

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Masalah lapangan kerja tidak dapat disangkal lagi merupakan salah satu masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan. Besar atau kecilnya jumlah pendapatan yang diperoleh dari lapangan kerja menentukan kemakmuran sebuah keluarga. Selain itu lapangan kerja juga merupakan wahana bagi sumber daya manusia untuk mengekspresikan diri mereka selaku makhluk pemfuaat alat. Di lain pihak, jika terdapat pengangguran dalam suatu masyarakat hal itu berarti kurang efisiennya pemanfaatan salah satu modal dasar dan faktor produksi yang tersedia. Bahkan jika pengangguran itu sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi, hal itu dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat yang bersangkutan (Hasibuan, 1996: 99).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia adalah pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2014 mencapai 121,87 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebesar 1,41% (1,7 juta jiwa) dibandingkan keadaan pada Agustus 2013. Peningkatan angkatan kerja menunjukkan penawaran tenaga kerja di dalam pasar bertambah, namun penawaran tenaga kerja yang bertambah tidak selalu diiringi dengan permintaan tenaga kerja yang mampu

menyerap angkatan kerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,94% (7,24 juta jiwa).

Keadaan pasar tenaga kerja di Indonesia terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2014, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 252,7 juta jiwa, dimana 48,23% (121,9 juta jiwa) diantaranya menjadi bagian dari angkatan kerja. Jumlah lapangan kerja meningkat sebesar 1,7% dari bulan Agustus 2013 hingga Agustus 2014, angkatan kerja meningkat sebesar 1,4%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 0,47% pada periode yang sama. Meskipun TPT mengalami penurunan, namun penurunan nilai TPT tersebut masih kecil dibandingkan peningkatan angkatan kerja di Indonesia (ILO, 2015).

Tabel 1.1 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat



Tahun	Penyerapan Tenaga Kerja
2011	18192580
2012	19209700
2013	19644807
2014	20127924
2015	19491967

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Barat, 2015

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat mengalami keadaan yang naik turun namun tidak terlalu signifikan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan dari 18192580 orang di tahun

2011 menjadi 2012 7924 orang ditahun 2014, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 19491967 orang.

Kenaikan upah memang dapat meningkatkan kesempatan kerja melalui peningkatan konsumsi, namun dalam beberapa kasus kenaikan upah justru berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Menurut Sumarsono (2003: 106) perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan.

Menurut Kuncoro (2002:199), kenaikan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, maka harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Hal tersebut mendorong pengusaha untuk menghemat tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harganya lebih murah guna mempertahankan keuntungan. Kenaikan upah juga mendorong perusahaan meningkatkan harga per unit produk sehingga konsumen cenderung mengurangi konsumsi produk tersebut. Hal ini menyebabkan banyak hasil produksi yang tidak terjual, akibatnya produsen terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja.

Selain upah, ada beberapa hal yang juga mendapat perhatian dari pemerintah sebagai upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yaitu produk domestik regional bruto dan investasi. Faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit

produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi (Periyanto, 2014: 43).

Menurut Schumpeter dalam Boediono (1998:79) pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai peningkatan *output* masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang digabungkan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi yang digunakan. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Ketenagakerjaan merupakan masalah yang selalu menjadi perhatian utama pemerintah dari masa ke masa. Permasalahan ini menjadi penting mengingat berkaitan erat dengan pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masalah ketenagakerjaan menunjukkan bahwa semakin tinggi angka pengangguran maka akan meningkatkan probabilitas kemiskinan, kriminalitas, dan fenomena-fenomena sosial-ekonomi di masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

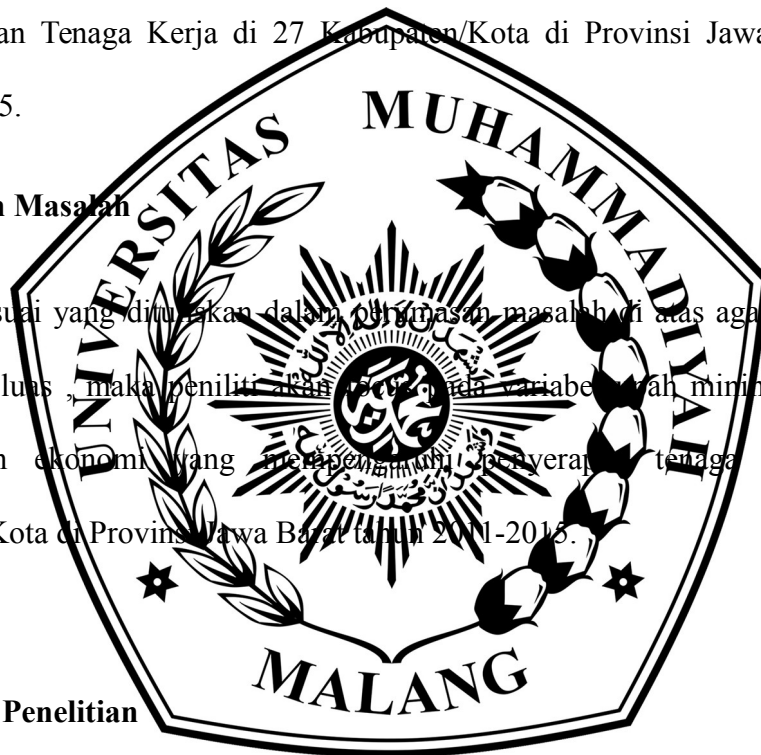
- 1 Bagaimana Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja, Upah Minimum Regional dan Pertumbuhan Ekonomi di 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015.
- 2 Bagaimana Pengaruh Upah Minimum Regional dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015.

1.3 Batasan Masalah

Sesuai yang ditunjukkan dalam rumusan masalah di atas agar pembahasan ini tidak meluas, maka peneliti akan fokus pada variabel upah minimum regional, pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015.

1.4 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui dan Menganalisis Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja, Upah Minimum Regional dan Pertumbuhan Ekonomi di 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015.



- 2 Untuk mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Upah Minimum Regional dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan aspirasi pemikiran terhadap pengambilan kebijakan dalam hal yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan agar dijadikan landasan untuk penelitian lebih lanjut dan sebagai pengembangan penelitian budangnya yang terutama berkaitan dengan variabel yang diteliti.

